

Legal Protection for the Rights of Muslim Women Detainees in Carrying Out Their Religious Rights in the Investigation Process

Author:

Dina Afifah¹ and Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.²

ABSTRACT

This legal research has the purpose to investigate whether detention centres in Jakarta has adhered to state requirements outlined by the Human Rights Law No. 39 year 1999, 1945 Indonesian Constitution, other national laws as well as international law that has been ratified by Indonesia in terms of freedom of religion.

This legal research is using both normative and empirical approach normative approach is essential to examine regulations, books, and other literature which are relevant to the topic that is discussed in this research. Where empirical approach is essential to get information that has been experienced directly and to get facts from the source that knows really well in their field, which related to rights protection of Muslim women detainee in carrying out their religious rights in the investigation process.

This legal research concluded that Indonesian laws and regulations have not sufficiently regulated the religious rights and obligations of detainees, especially for Muslim women. The findings from this legal research highlights that there is still a clear issue regarding the detention uniform. Currently there is no law or regulation that manages what type of model or shape the detainees have to wear, only that they are required to be dressed the same. Which means Muslim women are not able to cover their private parts/Aurat and therefore aren't able to fulfil their religious rights.

Keywords: Muslim Women Detainee, Detainee, Detention Center, Freedom of Religion, Investigation Process.

¹ Undergraduate student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (IUP 2016)

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Perlindungan Hukum untuk Hak-Hak Tahanan Perempuan Muslim dalam Melaksanakan Hak Beragama mereka pada Proses Penyidikan

Oleh:

Dina Afifah³ dan Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.⁴

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menyelidiki rumah-rumah penahanan di Jakarta telah mematuhi persyaratan negara yang digariskan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, hukum nasional lainnya serta hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam hal kebebasan beragama.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif sangat penting untuk menganalisis dan memeriksa peraturan, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan empiris sangat penting untuk mendapatkan informasi yang telah dialami secara langsung dan untuk mendapatkan fakta dari sumber yang tahu betul di bidangnya, yang terkait dengan perlindungan hak-hak tahanan wanita Muslim dalam melaksanakan kewajiban agama mereka pada proses investigasi.

Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa hukum dan peraturan Indonesia belum cukup mengatur hak dan kewajiban agama para tahanan, terutama bagi perempuan Muslim. Temuan-temuan dari penelitian hukum ini menyoroti bahwa masih ada masalah yang jelas mengenai seragam penahanan. Saat ini tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur jenis model atau bentuk apa yang harus dikenakan oleh tahanan, mereka hanya diharuskan berpakaian sama, yang berarti wanita Muslim tidak dapat menutupi aurat / bagian pribadi mereka dan karena itu tidak dapat memenuhi kewajiban agama mereka.

Kata kunci: Tahanan Wanita Muslim, Tahanan, Pusat Penahanan, Kebebasan Beragama, Proses Investigasi.

³ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (IUP 2016)

⁴ Lecturer at the Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada